

Masyarakat Cemas dengan Masa Depan

MASYARAKAT Indonesia merasa waswas dan tidak nyaman dengan masa depan hidup mereka. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak bisa meningkatkan kreativitas demi pengembangan diri dan perbaikan kualitas hidup.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh saat deklarasi dan pelantikan Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, dan Pengurus Nasional Demokrat Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Bandung, kemarin. Tidak kurang, 1.000 orang dari berbagai unsur menghadiri acara itu.

"Kita harus mengatakan secara *fair* dan objektif bahwa rata-rata masyarakat meng-

alami kecemasan dalam hidup mereka karena masalah sosial maupun ekonomi di Tanah Air. Akibatnya, mereka tidak memiliki rasa percaya diri untuk bangkit dari keterpurukan," ujar Surya.

Menurut Surya, salah satu pemicu ketidaknyamanan masyarakat selama ini adalah merosotnya kredibilitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan setiap masalah bangsa. Akibatnya menjatuhkan mental sekaligus membuat masyarakat hidup dalam ketidakpastian.

Ia kembali mengkritik sikap pemerintah yang terus menonjolkan prestasi lewat statistik mulai dari penurunan angka ke-



Sri Sultan HB X
Ketua DPP Nasional Demokrat

miskinan, pengangguran, hingga pemberantasan korupsi.

Surya menegaskan, Nasional Demokrat hadir tidak untuk menjatuhkan pemerintah. Sebaliknya, ia dan anggota organisasi masyarakat ini ingin mengajak masyarakat jangan terlalu

menuntut.

"Sebagai warga negara, kita tahu diri. Kita tidak pernah menuntut pemerintah yang ada sekarang untuk mundur sekalipun para pemimpinnya gagal mengemban amanah rakyat," tuturnya. Apalagi organisasi masyarakat ini tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah kebijakan, atau membuat undang-undang.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Nasional Demokrat Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam orasinya menyoroti pendekatan materi yang melunturkan nilai kejujuran dan moralitas. Uang pada kenyataannya mampu membeli martabat manu-

sia sehingga pemimpin dan masyarakat hidup dalam kebohongan.

"Nasional Demokrat akan mengembalikan peradaban menjadi beradab. Kearifan lokal yang ditanamkan para leluhur sungguh-sungguh menjadi roh dalam kehidupan bangsa Indonesia," ungkapnya.

Jabar merupakan provinsi ke-29 yang telah membentuk kepengurusan Nasional Demokrat. Sebanyak 45 tokoh adat, politisi, dan akademisi menjadi deklarator. Mayjen TNI (Purn) Sudrajat ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengurus Jabar. Sementara sepeuh Jabar Tjetje Hidayat Padmadinata menjadi ketua dewan pertimbangan. (AX/EM/R-2)



NASIONAL DEMOKRAT JAWA BARAT: Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh (kiri) membacakan sumpah jabatan kepada Ketua Nasional Demokrat Provinsi Jawa Barat, Sudrajat (memegang bendera), saat pelantikan di Bandung, Jabar, kemarin.

Majelis Kehormatan Hakim Konfrontasi Semua Pihak

Kuasa hukum calon Bupati Bengkulu Selatan mengakui adanya pertemuan antara anggota keluarga hakim dan orang yang berperkara.

SETYAWATI

KETUA tim investigasi dugaan suap hakim konstitusi Refly Harun dan rekannya, Maheswara Prabandono, dikonfrontasi dengan Bupati Simalungun JR Saragih, dan hakim konstitusi Akil Mochtar. "Hari ini hanya mendengar saja. Yang pertama didengar Dirwan (Mahmud) dan Neshawaty," ujar Ketua MKH Harjono di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, kemarin malam. "Yang berikutnya Akil (Mochtar), Jufinus, Jumadiah, bersama-sama dengan Refly dan Prabandono."

Jumadiah adalah sekretaris Bupati Simalungun JR Saragih. Refly yang datang sekitar pukul 19.00 WIB, ditemani Maheswara. Refly yang mengenakan jaket hitam pun menegaskan dirinya

tidak mempersiapkan apa-apa. Apa yang disampaikan ke MKH masih akan sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya.

"Kurang lebih sama apa yang kita sampaikan ke KPK, hakim-hakim. Tidak akan ada perubahan apa-apa. Kan testimoninya sudah disampaikan tim investigasi," ujar Refly.

Ditambahkan Refly, dirinya berharap MKH ini akan tetap bersifat tertutup tanpa adanya pengacara. Refly menyebutkan sebelum dirinya, MKH sudah mengkonfrontasi mantan calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan putri hakim konstitusi Arsyad Sanusi, Neshawaty. Dirwan didampingi pengacara.

"Kita berharap pemeriksaan tertutup. Kita saja tidak bawa pengacara," imbuhnya.

Terkait dengan dirinya yang pernah membongkar dugaan

suap di MK, Refly menegaskan yakin dengan hakim MKH yang memeriksa nanti akan profesional. "Saya yakin sama hakim di MKH. Kalau ada serangan balik yah wajar saja. Risiko itu datang dengan sendirinya," tutupnya sembari masuk ke lift yang membawanya ke lantai 15.

Ada pertemuan

Sementara itu, MKH yang dibentuk MK untuk mengusut pelanggaran kode etik hakim konstitusi, sebelumnya sudah mengkonfrontasi mantan calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dengan putri hakim konstitusi, Arsyad Sanusi, Neshawaty pada pukul 14.30 WIB di ruang rapat lantai 15.

Setelah dikonfrontasi sekitar 2 jam, kedua belah pihak mengaku memang ada pertemuan antarkeduanya sebanyak dua kali.

"Yang jelas, Dirwan tetap dengan keterangannya yang disampaikan ke tim investigasi. Dari dua kali pemeriksaan sebelumnya, keterangannya tetap sama. Yang dikatakan Dirwan itu yang sebenarnya," ujar kuasa hukum Dirwan, Muspani.

Menurut Muspani, yang terpenting dalam pemeriksaan ini, memang benar kalau ada pertemuan antara anggota keluarga hakim dan orang yang berperkara.

"Tapi yang pasti dari ini semua, mereka ini memang saling berhubungan. Jadi memang betul, Dirwan ke rumah Neshawaty. Neshawaty juga mengakui itu. Betul Zaimar itu pamannya Neshawaty."

Oleh karena itu, Muspani menilai apa yang sudah disampaikan sudah cukup. Pasalnya MKH hanya mengusut dugaan etika hakim konstitusi. Hasil

pemeriksaan ini, menurut Ketua MK Mahfud MD, akan selesai pada pekan pertama Februari dan diumumkan hasilnya.

Dirwan mendatangi MK dengan dikawal lima polisi dari Polres Lampung Selatan dipimpin Kasat Narkoba AKP Fahrul. Dirwan kini justru tersandung masalah narkoba ketika tertangkap saat ada razia di Pelabuhan Bakauehi pada 2 Januari lalu.

Adapun Neshawaty segera meninggalkan Gedung MK bersama ayahnya, Arsyad Sanusi. Sebelumnya ia sempat memberikan keterangan yang menyebutkan ada miskomunikasi dalam masalah tersebut.

Ditambahkan Neshawaty, tidak ada yang baru dalam konfrontasi tersebut. Mereka masih dengan versinya masing-masing. (R-2)

setyawati@mediaindonesia.com

Interupsi

Selengkapnya di mediaindonesia.com

Seret Semua Kroni Nurdin



PENGANTAR

PERLAWANAN terhadap Ketua Umum PSSI Nurdin Halid kian menguat. Bekas narapidana kasus korupsi itu digugat untuk mundur lewat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Gugatan dilayangkan lima pecinta sepak bola nasional, yakni Komisaris Utama Persebaya 1927 Saleh Mukadar, mantan Ketua Bidang Organisasi PSSI Tondo Widodo, mantan Ketua Pengda PSSI Jawa Tengah Sumaryoto, Johannes Sugianto, dan eks pengurus Persekabpas Pasuruan, Abubakar Assegaf.

Atas peristiwa tersebut, sejumlah pembaca memberikan tanggapan melalui Mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum Media Indonesia, dan interupsi@mediaindonesia.com. Berikut petikannya.

Semua Harus Clear

BAGUSLAH, semuanya harus *clear* di pengadilan.

Radis Dilan

Nurdin Turun, itu Baru Benar

PSSI enggak bakal maju kalau masih dipegang sama Nurdin Halid. Yang benar, Nurdin turun!

Nurdin Ibnu Ali Baelah

Tunggu Lebaran Monyet

PSSI adalah kerajaan..... Presiden pun tak mampu menurunkan Nurdin. *Hebaaaaaaaan* sampai Lebaran monyet juga enggak bakal timnas masuk Piala Dunia. Aneh, tidak berprestasi kok dipertahankan!!!!

Ferri Bye

Sikat Juga Temannya Nurdin

BUKAN saja si Nurdin, tapi jajaran PSSI yang *back-up* dia tuh sebaiknya dilengserkan. Buat apa Nurdin lengser? Toh jang-jangan nurdin-nurdin yang lain masih aktif di PSSI.

Sutyono Pratamanugraha

Yook Kita Gusur Nurdin

GUSUR si Nurdin *belekok*....

Taufiq Akbar Sanusiputra

Nurdin tidak Sportif

NURDIN sebenarnya tak mengerti sepak bola. Andai dia tahu artinya sepak bola? Dengan sportif, tanpa digugat, dengan *legowo* harusnya dia sadar mundur dengan sendirinya!

Anam Syahmadani

Urut Malu Nurdin Putus

MELANGGAR hukum mungkin hal biasa baginya. Tapi yang pasti, usaha dia keluar dari jeratan itu *luuar* biasa. sulit memberi pelajaran orang yang urut malunya putus.

Nick Joehara Yw



PEREKONOMIAN nasional berkembang bersamaan dengan negara-negara lain di sekitarnya di dalam kawasan Asia Pasifik. Ekonomi nasional mendapat keuntungan karena faktor pendorong dari kutub ekonomi dunia di luar kawasan Asia Pasifik yang sedang mengalami stagnasi.

Ada faktor pendorong (*pushing factor*) pada ekonomi keuangan mereka untuk kemudian memindahkan modal mereka ke kawasan lain yang lebih stabil dan menguntungkan. Indonesia berkembang karena pengaruh positif itu.

Faktor pendorong perkembangan ekonomi sangat kuat sehingga membentuk pasar yang sebenarnya cukup kondusif, terutama sektor keuangan. Bayangkan, pemerintah Orde Baru paling tidak tiga dekade menerapkan strategi industri dan perdagangan hanya mampu

mengumpulkan cadangan devisa sekitar US\$30 miliar.

Namun, pemerintah sekarang tanpa strategi besar yang memadai atau kasarnya 'ongkang-ongkang kaki' dengan mudah bisa menupuk cadangan devisa hampir US\$100 miliar. Itu terjadi lebih karena faktor pendorong di negara asal modal mengalir itu, bukan karena faktor penarik (*pulling factor*), yang sangat baik pada internal sistem ekonomi dan sosial politik.

Betapa nikmatnya jadi pemerintah pada saat ini dengan kondisi eksternal yang mendukung, paling tidak dilihat dari sudut pandang ekonomi. Demokrasi seharusnya membuat keadaan stabil karena proses pemilihan

umum sejatinya mengagregasikan aspirasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya dan kemudian membentuk kekuasaan-pemerintahan. Akan tetapi, ternyata banyak masalah hadir di hadapan masyarakat sehingga biaya demokrasi menjadi mahal.

Demokrasi itu sendiri kemudian membentuk kekuasaan yang tidak produktif menyelesaikan banyak masalah kolektif dalam bidang sosial politik, hukum maupun ekonomi. Semestinya banyak masalah kesenjangan sosial, kesenjangan pusat dan daerah, serta masalah sosial lainnya dapat diselesaikan pada saat ini.

Karena perekonomian bertum-



Didik J Rachbini
Pengamat Ekonomi Politik Indef

buh, potensi pajak berkembang sehingga pemerintah memiliki banyak anggaran publik untuk melaksanakan misinya dalam hal kesejahteraan masyarakat. Kini penerimaan pajak relatif meningkat, anggaran publik di DPR sudah mencapai tidak

kurang dari Rp1.100 triliun. Jumlah itu sudah jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran pada masa Orde Baru, yang jumlahnya di bawah Rp100 triliun.

Namun, potensi ekonomi itu tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan, yang lebih mendasar, khususnya masalah ekonomi di lapisan bawah. Selama beberapa tahun terakhir ini, justru sektor informal yang marjinal bertambah besar jumlahnya dari 65 juta orang menjadi 75 juta orang.

Pemukiman kumuh di seluruh Nusantara bertambah luas dari 50 ribu ha menjadi 57 ribu ha. Data itu sejalan dengan jumlah

sektor informal yang meningkat dan jumlah kemiskinan dan kelompok hampir miskin yang masih besar jumlahnya. Jadi kalau pemerintah mengklaim sudah berhasil meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan hanya dengan melihat satu indikator garis kemiskinan, itu jelas salah kaprah.

Pasar berkembang baik. Nakhoda kapal untuk menyelesaikan hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pasar, dalam hal ini adalah pemerataan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, kesempatan kerja, perlindungan, dan sebagainya.

Soal pertumbuhan ekonomi tidak usah dipermasalahkan lagi karena setelah kondisi eksternal

kegiatan ekspor dan ekspor mulai pulih kembali dan bahkan meningkat, meskipun penerimaan devisa dari ekspor karena harga komoditi yang meningkat. Sektor jasa keuangan juga tidak perlu diklaim sebagai keberhasilan pemerintah karena *inflow* modal terjadi akibat faktor pendorong di negara asalnya yang tidak menguntungkan.

Tugas pemerintah sebenarnya tidak bisa langsung menyelesaikan masalah-masalah kritis bidang sosial ekonomi itu karena masih disandera sistem dan politik kekuasaan yang buruk.

Bereskan dulu sistem dan praktik politik kekuasaan yang sekarang mengganggu dan menghambat pencapaian kesejahteraan ekonomi, jadikan politik lebih produktif sehingga bisa mengatasi masalah-masalah yang menjadi tugas pemerintah.

PODIUM

Pasar Baik, Politik Buruk